PERANAN KEYAKINAN HAKIM DALAM PERKARA YANG PEMBUKTIANNYA LEMAH

Oleh: Edwin Alexander Simaremare
Pembimbing 1: Dr. Erdianto, SH., M.Hum
Pembimbing 2: Ledy Diana, SH., MH
Alamat : Jln. Letjend S.Parman No.16 Pekanbaru
Email : alexanderedwin52@yahoo.co.id
Telepon : 0852-7697-9968

ABSTRACT

The system of evidence in criminal procedure law which in its examination process demands the search for truth other than based on valid evidence and reaches the minimum limit of proof must also be supported again by the judge's belief in the truth has proved the defendant's defeat (beyond a reasonable doubt), the truth is realized really Based on undoubted evidence, so that the truth is considered to be of the essence of truth (materialele waarheid).

Based on this understanding the authors formulate two formulation of the problem, namely: First, How the existence of the evidentiary system by using two evidences and judge's conviction ?. Second, What are the advocates and obstacles in generating judge confidence in weak systems of evidence?

The type of research or approach used by the author is normative legal research. Normative legal research is a literary legal research. Because making the literature as the main focus of this research, the data source used, primary data, secondary data, and tertiary data, technical data collection in this study by literature study then by analyzing and processing the data qualitatively and generate descriptive data and then take the conclusion Deductively. From the research results of the problem there are three main points that can be concluded, namely: First, the existence of the evidentiary system by using two evidences and the judge's conviction has not been fully applied in the criminal justice system. Second, the supporters of the judge's judgment in determining the decision include the motivation or good faith of the judge to determine the fate of the defendant, the firmness of faith and devotion, the abilities and experience, the attitude, the circumstances, the background and the social status of the accused, other evidence is good because Conformity with valid or unlawful evidence, personal, family, environment in which the judge resides and the willingness of the judge to continue to study according to his discipline. While the obstacles for the judge in raising his conviction to determine the defendant's faults is the existence of bribery and intimidation or threats against the judge.

Keywords: Role of Judge Belief-Weak System of Proof

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaats*), kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.¹

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP termaksud menjamin tegaknya kebenaran keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana, dari penjelasan Pasal 183 KUHAP dapat diambil suatu makna hukum bahwa sistem pembuktian yang paling tepat untuk diterapkan dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya “kebenaran sejati”, keadilan dan kepastian hukum. Sistem pembuktian ini merupakan perpaduan dari dua sistem, yaitu *Conviction In Time* (keyakinan hakim) dan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang dalam proses pemeriksaannya menuntut

pencarian kebenaran selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian juga harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran telah terbuktinya kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*), kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran yang hakiki (*materiele waarheid*).

Hal yang sering terjadi dalam praktek, dalam pertimbangan suatu putusan, seringkali terjadi penilaian keyakinan hakim terjadi tanpa benar-benar menguji dan mengkaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti terungkap, atau dengan berbagai argumentasi rasional yang benar-benar menjadi dasar keyakinannya. Begitu pula sering ditemukan putusan pengadilan yang mendasarkan penilaian salah atau tidaknya terdakwa, semata-mata berdasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Motivasi pertimbangan hukum membuktikan kesalahan terdakwa, tidak diwarnai dan tidak dipadukan dengan keyakinan hakim.

Salah satu tindak pidana yang memerlukan keyakinan hakim dan alat pembuktian kuat adalah pencabulan atau pelecehan seksual, contohnya pada kasus yang terjadi di Pekanbaru, terdakwa Jefri Bin Marlis, seorang karyawan swasta yang telah dituduh melakukan tindak pidana pencabulan terhadap pembantu

¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 93.

rumah tangganya sendiri yang bernama Ida Famiya Suciya Als IDA Binti Nasrul di rumah terdakwa di Jalan Hangtuah Perumahan Bukit Mutiara Permai III Blok E-13 RT 01 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Berawal pada hari Jumat, Tanggal, 13 Maret 2015 Pukul 14.30 WIB, korban melaporkan kasus pencabulan yang dilakukan oleh terlapor yang merupakan majikan tempat pelapor bekerja. Korban sudah bekerja di rumah majikan pada awal tahun 2014, korban dicabuli sejak awal september 2014, kejadian pencabulan ini lebih dari 10 kali dan sering terjadi atas bujuk rayu terlapor dengan mengajak korban diraba dan dicabuli oleh terlapor. Selama ini korban selalu dijanjikan untuk dinikahi dan diberikan sebagian harta terlapor. Di persidangan, Jaksa penuntut umum telah menghadirkan dua orang saksi ditambah satu barang bukti berupa surat visum. Namun setelah melalui tahapan pemeriksaan di pengadilan ternyata majelis hakim dalam putusannya Nomor: 373/Pid.B/2015/PN. Pbr menyatakan bahwa terdakwa Jefri Bin Marlis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum atau dengan kata lain terdakwa Jefry Bin Marlis diputus bebas (*vrijspraak*).²

Dan pada kasus yang berikutnya dibutuhkan peranan keyakinan hakim serta melihat

alat-alat bukti yang ada adalah pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mirna Salihan, Pada tanggal 6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin, 27 tahun, meninggal dunia setelah meminum kopi es vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia. Saat kejadian, Mirna diketahui sedang berkumpul bersama kedua temannya, Hani dan Jessica Kumala Wongso. Menurut hasil otopsi pihak kepolisian, ditemukan pendarahan pada lambung Mirna dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Belakangan diketahui, zat korosif tersebut berasal dari asam sianida. Sianida juga ditemukan oleh Puslabfor Polri di sampel kopi yang diminum oleh Mirna. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Jessica dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Terdapat beberapa kronologi berbeda dari kasus pembunuhan ini, dikarenakan keterangan saksi yang sering berubah-ubah. Kronologi pertama adalah keterangan dari teman berkumpul Mirna pada saat kejadian, Jessica, dan kronologi kedua diungkapkan oleh teman Mirna lainnya yang juga berada di TKP, yaitu Hani, kepada pihak kepolisian. Setelah melewati beberapa kali persidangan, Jessica Kumala Wongso pada akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dalam tuntutananya, jaksa

² Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pekanbaru

menyebutkan bahwas Jessica diyakini terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menaruh racun sianida dengan kadar 5 gram. Jessica disebut menutupi aksinya dengan cara meletakkan 3 kantong kertas di meja nomor 54. Pada 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso dijatuhi vonis pidana penjara selama 20 tahun.³

Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa, kedudukan dan fungsi “Keyakinan Hakim” ternyata lebih signifikan dan lebih dominan, karenanya dalam praktek peradilan meskipun dimuka sidang pengadilan penuntut umum telah mengajukan puluhan alat bukti yang sah dalam berbagai bentuk, yaitu saksi, ahli, surat, dan lain lain namun kalau hal tersebut tidak berhasil menimbulkan keyakinan hakim tidak akan memutuskan bahwa terdakwa bersalah maupun sebaliknya apabila hakim memperoleh keraguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan atau yang disebut *Asas In Dubio Pro Reo*.⁴

Pertimbangan yang dibuat dan ditetapkan Hakim mungkin saja keliru sekalipun telah dilakukan dengan jujur, hati-hati, dan penuh respek, namun lebih dari sekedar pernyataan maklum di atas, problem ini lebih banyak

muncul sebagai bentuk dari distorsi komunikasi.⁵ Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa di putus bebas. Apakah yang menjadi dasar keyakinan hakim sehingga hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan apabila hakim tidak memiliki keyakinan bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar hasil tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa?

Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang ada, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul : **“PERANAN KEYAKINAN HAKIM DALAM PERKARA YANG PEMBUKTIANNYA LEMAH ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keberadaan sistem pembuktian dengan menggunakan dua alat bukti dan keyakinan Hakim?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam menimbulkan keyakinan Hakim terhadap sistem pembuktian yang lemah?

³https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_Wayan_Mirna_Salihin, diakses pada tanggal 6 Juni 2017.

⁴Putusan Mahkamah Agung No.33K/MIL/2009

⁵ Anthon F. Susanto, *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgesif*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 11.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui keberadaan sistem pembuktian dengan menggunakan dua alat bukti dan keyakinan hakim.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menimbulkan keyakinan hakim terhadap sistem pembuktian yang lemah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada penulis pada khususnya dan kepada pembaca pada umumnya tentang bagaimana Hakim memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan alat bukti.
- b. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum yang menjadi pusat kajian penelitian ini terkhusus bagi Hakim dalam memutus kasus tindak pidana.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Menurut Willièm Shakespeare dalam bukunya *As You Like It*, ia mengatakan peran dan kedudukan (status) merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Menurut dia, “status” di defenisikan

sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain, sedangkan “peran” adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Dengan pengertian lain, status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.⁶

Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan dalam unsur-unsur, sebagai berikut:⁷

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan

⁶ Aminuddin Ran dan Tita Sobari, *Sosiologi*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1991, hlm. 118.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 20.

pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

2. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.⁸

Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:⁹

- a. Undang-Undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi;

Secara Teoretis terdapat 4 (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu:

- 1) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim

tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.

Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.¹⁰

- 2) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisonne*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisonne* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti

⁸ Hari Sasangka, Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11.

⁹ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 241.

telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Hal yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis.

Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.¹¹

- 3) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theode*).

Sistem ini ditempatkan berhadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif

wettelijk sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijkbewijs theori system* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat *Inquisitor*. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.

- 4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya".

¹¹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm. 56.

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan. Pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹² Karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama melakukan penelitian ini. Di dalam penelitian hukum normatif memiliki kriteria jenis penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum..

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23

2. Sumber Data

Dalam penelitian data yang digunakan ialah data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

b. Bahan Hukum Sekunder

b. Bahan Hukum Tertier

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal research*) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan dilakukan penulis adalah analisis *kualitatif* merupakan data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun dengan sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang diperoleh. Deskriptif adalah gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut.¹³

PEMBAHASAN

A. Keberadaan Sistem Pembuktian Dengan Keyakinan hakim

Hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh dalam membicarakan kebenaran formil adalah masalah ada atau tidaknya

¹³ Meilany dan Weni Rahayu, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia 1*, PT. Mediantara Semesta, Jakarta, 2012, hlm. 116.

keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pidana. Secara umum para praktisi hukum (hakim dan pengacara atau advokat) belum mempunyai persepsi yang sama dalam menyikapi masalah ini. Di satu sisi ada yang membenarkan terhadap adanya keyakinan hakim dalam perkara pidana, tetapi di sisi lain ada pula yang menolaknya.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).¹⁴

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Hal ini karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-

perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan.¹⁵ Namun kenyataannya, putusan-putusan yang dibuat oleh hakim sering mengundang kontroversial. Tidak jarang terjadi terhadap pelaku tindak pidana yang satu dijatuhkan pidana berat sedangkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan dibebaskan, padahal pasal yang dilanggar adalah sama.

Akhir-akhir ini banyak putusan, penetapan, dan tindakan hakim atau majelis hakim yang mendapatkan kritik dan reaksi negatif dari masyarakat, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Mahkamah Agung sendiri berkesimpulan bahwa terjadinya kritik dan reaksi negatif tersebut disebabkan karena kurangnya atau lemahnya kontrol ketua pengadilan¹⁶ atau lemahnya manajemen pengawasan pimpinan pengadilan (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986) terhadap pelaksanaan tugas para hakim. Kelemahan kontrol tersebut adalah sebagai akibat adanya kerancuan memahami prinsip kebebasan hakim yang diidentikkan dengan kebebasan lembaga peradilan.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*" keterangan

¹⁴ Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm. 67.

¹⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁶ SEMA Nomor 10 Tahun 2005, tentang bimbingan dan petunjuk Pimpinan Pengadilan terhadap hakim/majelis hakim dalam menangani perkara.

saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji;
- 2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti.

Apabila Hakim sudah merasa cukup dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, maka tibalah saatnya ia akan memberikan putusan atas perkara yang diajukan. Dalam memutus perkara tersebut disyaratkan dalam undang-undang bahwa disamping berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang, juga harus berdasarkan pada keyakinan hakim. Untuk menentukan adanya keyakinan ini tidaklah mudah bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Keadaan demikian dikhawatirkan jika hakim salah dalam menentukan keyakinannya, maka akan terjadi kesesatan yang mengakibatkan putusan hakim menjadi tidak adil. Menurut Mulyatno, keyakinan hakim adalah suatu keyakinan yang ada pada diri hakim, kalau ia sudah tidak menyangsikan sama sekali akan adanya kemungkinan lain daripada yang digambarkan kepadanya melalui suatu pembuktian. Jadi hal yang diyakini kebenarannya itu sudah di luar keragu-raguan yang

masuk akal (*beyond reasonable doubt*).¹⁸

Keyakinan yang kedua tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang objektif. Namun, mengenai keyakinan hakim yang ketiga, bisa jadi berlainan dengan keyakinan yang pertama dan kedua. Pada keyakinan hakim yang ketiga, yakni keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana; bisa terjadi terhadap dua hal atau unsur, ialah pertama hal yang bersifat objektif dan kedua hal atau unsur yang bersifat subyektif.

Menurut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatif yang terbatas) ini hakim tidak boleh menyatakan sesuatu terbukti apabila tidak disertai keyakinan tentang terbukti objek apa yang dibuktikan itu *in casu* tiga tingkat keyakinan tadi. Artinya, atas fakta-fakta hukum dari minimal dua alat bukti dalam persidangan tidak boleh menarik kesimpulan sebagai terbukti, bila penarikan kesimpulan itu tidak melalui penilaian subyektif hakim terlebih dulu yang namanya keyakinan tersebut.

B. Pendukung dan Penghambat dalam Menimbulkan Keyakinan Hakim Terhadap Sistem Pembuktian yang Lemah

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 265.

¹⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 21.

Hakim dalam menimbulkan keyakinannya ada beberapa hal yang mempengaruhi, hal tersebut bisa merupakan hal yang mendukung dan juga bisa merupakan hal yang menghambat.

1. Pendukung timbulnya keyakinan hakim dilihat dari alat bukti

Dalam menentukan putusannya, hakim selain harus mendasarkan alat-alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP) ada beberapa hal lain yang dapat mendukung timbulnya keyakinan hakim:

a) Motivasi atau itikad baik dari hakim untuk menentukan nasib terdakwa.

Hakim adalah figur sentral dalam proses peradilan, senantiasa dituntut untuk membangun kecerdasan intelektual, terutama kecerdasan emosional, kecerdasan moral dan spiritual, jika kecerdasan intelektual, emosional, dan moral spiritual terbangun dan tepelihara dengan baik bukan hanya akan memberikan manfaat kepada diri sendiri, tetapi juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam konteks penegakan hukum.¹⁹

b) Ketangguhan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Dalam upaya menegakkan hukum dan

keadilan seorang hakim harus mempunyai benteng iman yang kuat dan ketaqwaan yang sebenarnya taqwa agar tidak mudah untuk tergoyahkan dan terpengaruh dengan rayuan, kebohongan dan atau imbalan berbentuk apapun dari “penjahat pengadilan”.

c) Kemampuan dan Pengalaman

Kemampuan dan pengalaman yang dimaksud adalah kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang hakim sesuai dengan profesi dan disiplin ilmu yang digeluti.

d) Sikap, keadaan, latar belakang dan status sosial terdakwa

Dalam hakim menilai kebenaran suatu perkara selain harus berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah, ia juga dapat memperoleh keyakinannya dengan bantuan penilaian pada fakta, keadaan dan kejadian yang melatarbelakangi suatu tindak pidana yang terjadi. Fakta, keadaan dan kejadian yang dimaksud bisa berasal dari apa yang ditemukan di persidangan maupun diluar sidang.

e) Bukti-bukti lain karena persesuaiannya dengan alat-alat bukti yang sah atau tidak.

Dalam pembahasan sebelumnya telah disampaikan bahwa Hakim dalam rangka menimbulkan keyakinannya selain harus

¹⁹ Ahmad Kamil, *Pedomana perilaku Hakim dalam perspektif Filsafat Etika*, Dalam Majalah Hukum, suara Uldilag No. 13, MARI, Jakarta, 2008, hlm. 38.

berdasarkan alat-alat bukti yang sah ia juga dapat memperoleh keyakinan itu dari bukti-bukti lain baik karena persesuaiannya dengan alat-alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP) maupun tidak. Bukti-bukti yang dimaksud yakni dapat berupa barang bukti dan pemeriksaan setempat, dan dengan bukti-bukti tersebut hakim menjadi yakin. Bukti-bukti yang dimaksud tersebut dapat menambah keyakinan hakim asalkan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tetap mengingat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

- f) Pribadi, keluarga dan lingkungan dimana hakim tinggal.

Hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selalu membutuhkan bantuan orang lain (mahkluk sosial). Hakim bukan malaikat yang selalu benar dan tidak pernah berbuat kesalahan namun hal itu bukan menjadikan tugas dengan apa adanya. Hakim dalam menjalankan tugas ini selalu mendapatkan tantangan yang tidak ringan apalagi dia juga dituntut untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari.

- g) Kemauan hakim untuk terus belajar sesuai dengan disiplin ilmunya.

Hukum dan keadilan harus benar-benar ditegakkan dengan tanpa

kompromi. Seiring dengan penegakan hukum semua elemen hukum yang terkait, baik sistem hukum (undang-undang), masyarakat dan penegak hukum sendiri harus meningkatkan kualitas substantif. Kualitas substantif yang dimaksud adalah kualitas dari makna hukum dalam arti yang sebenarnya. Hakim sebagai penegak hukum harus mempunyai tekad dan kemauan kuat dalam upaya menegakkan hukum dengan sebenar-benar adil. Seorang hakim dituntut untuk bisa memberikan keadilan kepada setiap pencari keadilan atau masyarakat. Keadilan seorang Hakim salah satunya dapat tercermin dari kualitas putusannya (vonis) terhadap terdakwa. Oleh karenanya Hakim dalam menjalankan tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁰

b. Penghambat timbulnya keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa

1. Praktek suap

Dalam hal mengenai praktek suap merupakan salah satu penghambat timbulnya keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. M. Yahya Harahap

²⁰ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

mengatakan bahwa bagi seorang Hakim yang kurang hati-hati dan atau karena kurang tangguh benteng iman dan moralnya dia akan mudah untuk menerima suatu imbalan materi dengan memanfaatkan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.²¹

Dalam menegakkan kebenaran “sejati”, keadilan dan kepastian hukum memang selalu menemui hambatan dan rintangan ini hendaknya dapat menjadikan timbulnya semangat, tekad dan keberanian hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan.

2. Intimidasi/Ancaman

Dalam menjalankan tugas sehari-hari seorang Hakim seringkali mengalami kesulitan untuk menerapkan hukum dan menjatuhkan pidana pada seorang terdakwa. Penulis dalam melakukan dan/atau mencari informasi sebagai bahan hukum pendukung dalam skripsi ini menemukan fakta-fakta sebagai berikut, bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Pbr atas nama terdakwa Jefri Bin Marlis, mengenai pertimbangan hakim yang berkaitan dengan keyakinan hakim atau alasan-alasan

yang menimbulkan hakim yakin bahwa terdakwa telah bersalah tidak ada sama sekali. Bahkan pernyataan yang menyebutkan bahwa hakim yakin atas kesalahan terdakwa itu pun tidak ada. Begitu juga pada kasus pidana dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, Putusan PN Jakarta Pusat Nomor:777/Pid.B/2016/PN.J KT.PST Tahun 2016 Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess tidak menyebutkan mengenai keyakinan hakim, atau pertimbangan/alasan-alasan yang menimbulkan hakim yakin bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Tetapi dalam pertimbangannya hakim cukup menyebutkan dengan kalimat, “Bahwa secara sah dan meyakinkan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana”, sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum pada surat dakwaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP maka keyakinan hakim tetap diperlukan dalam mengambil keputusan, meskipun penggunaan keyakinan hakim dalam perkara pidana tidak ada larangannya, tetapi bahwa hakim tidak dibenarkan dalam

²¹ M. Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 800.

memutuskan perkara pidana hanya berdasarkan pada keyakinannya saja dan mengabaikan bukti-bukti formil yang diajukan para pihak di persidangan, artinya dalam mengambil keputusan hakim harus yakin dengan keputusan dan berdasarkan alat bukti di persidangan.

2. Pendukung timbulnya keyakinan hakim dalam menentukan putusan antara lain adalah motivasi atau itikad baik dari hakim untuk menentukan nasib terdakwa, keteguhan iman dan ketaqwaan, kemampuan dan pengalaman, sikap, keadaan, latar belakang dan status sosial terdakwa, bukti-bukti lain baik karena persesuaian dengan alat bukti yang sah maupun tidak, diri pribadi, keluarga, lingkungan dimana hakim tinggal dan kemauan hakim untuk terus belajar sesuai disiplin ilmunya. Sedangkan yang menjadi penghambat bagi hakim dalam menimbulkan keyakinannya untuk menentukan kesalahan terdakwa adalah adanya praktek suap dan intimidasi atau ancaman terhadap diri hakim.

B. Saran

1. Sebagai lembaga peradilan, tentunya pengadilan melalui hakim-hakimnya diharapkan oleh para pencari keadilan untuk memberikan keadilan yang nyata bagi masyarakat dengan mempertimbangkan dalam putusan perkara pidana untuk menggunakan keyakinannya.
2. Hendaknya apa yang menjadi penghambat bagi para hakim untuk menimbulkan keyakinan tidak dijadikan dasar alasan untuk “menzolimi” hukum dan keadilan, akan tetapi sebaliknya apa yang menjadi pendukung keyakinan hakim dapat digunakan sebagai modal untuk mewujudkan kebenaran materil dan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung.

Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta.

Hamzah, Andy dan Bambang Waluyo, 1998, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Meilany dan Weni Rahayu, 2012, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia 1*, PT. Mediantara Semesta, Jakarta.

Moeljatno, 1982, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Ran, Aminudin dan Tita Sobari, 1991, *Sosiologi*, PT Glora Aksara Pratama, Jakarta.

Rasjidi, Lili, 2004, dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sasangka, Hari, dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Susanto, Anthon F. , 2007, *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgesif*, Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia
Nomor 5076.

C. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Pe mbunuhan_Wayan_Mir na_Salihin, diakses pada tanggal 6 Juni 2017.